

prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat suku Samin menganggap bahwa khitbah atau peminangan merupakan hal yang wajib dilakukan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peminangan Adat Suku Samin Untuk Mengetahui Kesuburan Calon Mempelai Wanita

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Khitbah merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminangan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan.

Dalam hukum Islam, peminangan bukan salah satu syarat dan rukun dari perkawinan. Adapun syarat dan rukun dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena syarat dan Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti

dilakukannya pun terlepas ketentuan dari syari'at Islam, maka didalam hukum Islam itu sudah sangat jelas tidak memperbolehkan untuk melakukan peminangan dengan cara menggauli sang wanita yang dipinang dalam satu kamar layaknya berhubungan suami istri seperti yang dilakukan adat suku Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

Akan tetapi orang yang menggunakan ajaran Islam itu sendiri tetap menggunakan kaidah ajaran Islam dalam artian pelaku peminangan adat suku Samin ada yang menggunakan suatu kebijakan yang tidak keluar dalam hukum Islam itu sendiri saat melakukan peminangan yang berkelanjutan ke pernikahan. Salah satunya hasil wawancara dari warga di desa Kemantren tersebut bapak Muhsin selaku orang suku Samin yang melakukan peminangan berbeda dari peminangan yang dilakukan warga suku Samin, beliau melakukan peminangan tersebut dengan jalan sebelum melakukan peminangan beliau terlebih dahulu melakukan wali hakim, karena menurut beliau peminangan yang dilakukan oleh ajaran suku Samin bertentangan dengan koridor atau ajaran yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebab dalam usaha meminta izin untuk melangsungkan perkawinan, si pelaku diharuskan melakukan adat dalam suku Samin agar supaya menggauli calon istrinya. Dengan keadaan seperti inilah pelaku yang memang benar-benar mengetahui ajaran syariat Islam tetap menjalankan adat yang telah berlaku pada suku Samin dengan mengadakan perkawinan melalui wali hakim

